

**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI



**NAMA : NURHASANAH TUSSAKDIYAH
NIM : 22 2013 337**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2017

**PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN OGAN ILIR
(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Nurhasanah Tussakdiyah
Nim : 22 2013 337**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2017

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di
Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD
Kabupaten Ogan Ilir)
Nama : Nurhasanah Tussakdiyah
Nim : 22 2013 337
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sekor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 13 Maret 2017

Pembimbing,



Mizan, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., Ak, M.Si CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhasanah Tussakdiyah

NIM : 22.2013.337

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 13 Maret 2017



Nurhasanah Tussakdiyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“All the impossible is possible for those who believe, don't lose the faith keep trying and praying. Do the best, be good then you will be the best“

Saya persembahkan Skripsi ini Kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku*
- ❖ Pembimbing Skripsiku*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Sahabat Terbaikku*
- ❖ Almamater Kebanggaanku*

PRAKATA



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”**.

Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini merupakan hasil penelitian pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017.

Skripsi ini dapat selesai tepat waktu berkat bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak. Secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Dra. Cholidja Tussakdiyah dan Ayahanda tercinta Drs. Hasan Effendy yang telah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, mendidik, membiayai, dan tidak henti-hentinya mendo'akan dan mensupport penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Mizan, SE., M.Si., Ak., CA yang telah membimbing,

mengarahkan, memberikan saran, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan tulus dan ikhlas.

Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Dekan beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE., Ak, M.Si, CA, dan Bapak Mizan, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala Dinas dan seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian disana.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan segala

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 Maret 2017
Penulis



Nurhasanah Tussakdiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2. Kualitas Laporan Keuangan	11

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	16
B. Penelitian Sebelumnya.....	22
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26
E. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Populasi dan Sampel	30
E. Data yang Diperlukan.....	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	33
1. Analisis Data.....	33
2. Teknik Analisis.....	35
a. Uji Validitas	36
b. Uji Reliabilitas	37
c. Uji Hipotesis	38
1) Uji Hipotesis Secara Parsial/Individu (Uji t)	38
d. Koefisien Determinasi.....	39
e. Uji Regresi Linier Sederhana	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	41
a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	41
b. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	42
c. Visi Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	44
d. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	45
2. Gambaran Karakteristik Responden	51
3. Gambaran Karakteristik Variabel	53
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	55
a. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X)	55
b. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	64
B. Hasil Pengolahan Data	69
1. Uji Validitas.....	69
a. Kualitas Laporan Keuangan (X)	69
b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	70
2. Uji Reliabilitas	71
3. Analisis Regresi Linear Sederhana	72
4. Uji Hipotesis t.....	74
5. Koefisien Determinasi	75
C. Pembahasan Hasil Penelitian	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Daftar Hasil Opini Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2015.. 6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 31
Tabel IV.1	Gambaran Umum Responden..... 54
Tabel IV.2	Hasil Total Jawaban Responden..... 55
Tabel IV.3	Analisis Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan..... 57
Tabel IV.4	Analisis Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 58
Tabel IV.5	Hasil Pengujian Validitas variabel X..... 59
Tabel IV.6	Hasil Pengujian Validitas variabel Y..... 60
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Reliabilitas..... 61
Tabel IV.8	Hasil Uji Regresi..... 62
Tabel IV.9	Hasil Uji t..... 64
Tabel IV.10	Koefisien Determinasi..... 65

HALAMAN GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar IV.1 Bagan Stuktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Jadwal Kegiatan Penelitian
Lampiran II	Kuesioner
Lampiran III	Tabulasi Hasil Jawaban Responden Data Ordinal dan Data Interval
Lampiran IV	Hasil Uji Validitas
Lampiran V	Hasil SPSS Uji Reabilitas
Lampiran VI	Hasil Uji Hipotesis t
Lampiran VII	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Lampiran VIII	Hasil Koefisien Determinasi
Lampiran IX	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran X	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
Lampiran XI	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	Fotocopy Surat Keterangan Riset dari Tempat Peneliti
Lampiran XIII	Fotocopy Sertifikasi Membaca dan Hapalan Al-Qu'ran
Lampiran XIV	Fotocopy Sertifikat TOEFL
Lampiran XV	Foto copy Piagam Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran XVI	Biodata Penulis

ABSTRAK

Nurhasanah Tussakdiyah/22.2013.337/2017/Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir). Jenis penelitian yaitu kausalitas. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan *software* SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Nurhasanah Tussakdiyah / 22.2013.337 / 2017 / Financial Reports Quality Impact Of Government Performance Accountability In Ogan Ilir (Case Study on BPKAD Ogan Ilir).

The purpose of this research was to determine the effect on the quality of financial reporting of performance accountability of government authorities in Ogan Ilir regency (Case study BPKAD Ogan Ilir). This type of research is causality. The data used primary and secondary data. Sampling was conducted with a sample of saturated or census. Data collection techniques using interview techniques, questionnaires and documentation. The analytical method used is the method of quantitative and qualitative analysis. Data were analyzed using simple linear regression with SPSS version 21.0. The results showed that the quality of the financial statements significantly affects on performance accountability of government agency.

Keywords: *Quality of Financial Statements, Government Agencies Performance Accountability*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo: 2009:20).

Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta

meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti

informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Deddi, 2008:25).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD, artinya dapat

dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak memberikan opini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraeni dan Budiantara (2015) dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah

secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Tabel I.1
Daftar Hasil Opini Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011-2015

Kabupaten	Hasil Opini BPK				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP

Sumber : bpk.go.id, 2017

Berdasarkan tabel I.1 kabupaten Ogan Ilir selalu mendapat opini WDP setiap tahunnya dan pada tahun 2014 pemerintahan kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan terbukti dengan kabupaten Ogan Ilir mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi pada tahun 2015 pemerintahan kabupaten Ogan Ilir kembali mendapatkan opini WDP dari BPK dikarenakan masih ada akun yang tidak sesuai dengan SAP yaitu akun pengecualian lain-lainnya (sumber bpk.go.id) yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan kabupaten Ogan Ilir masih tidak maksimal, hal itu dikarenakan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh SKPD yang ada di kabupaten Ogan Ilir.

Penulis juga telah melakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada salah satu pegawai BPKAD di kabupaten Ogan Ilir mengenai hasil opini yang diberikan BPK kepada Kabupaten Ogan Ilir. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis adalah

dikarenakan pada tahun 2015 SKPD di kabupaten Ogan Ilir salah satunya BPKAD baru merapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga masih banyak SKPD yang belum siap dengan perubahan tersebut.

Melihat fenomena diatas dapat kita simpulkan pada tahun 2015 di kabupaten Ogan Ilir telah terjadi penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terbukti dengan menurunnya kualitas laporan keuangan karena penerapan standar akuntansi pemerintah yang belum maksimal. Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah di kabupaten Ogan Ilir khususnya BPKAD kabupaten Ogan Ilir harus menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai acuan membuat laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas di kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar sesuai dengan kehendak yang dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai di penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah guna menghasikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, perbandingan dan referensi untuk penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party* (Budi, 2015 : 5-6).

Berkaitan dengan masalah keagenan, akuntabilitas kinerja dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan , baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk

melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010:25).

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus

disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi organisasi pemerintahan, antara lain: (Mardiasmo, 2009:162)

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*);
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Adapun penjelasan dari karakteristik kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut : (Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010)

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1) Memiliki umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian yang jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi lain dari, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP).

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009: 21).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Turner dan Humle pada Mardiasmo, 2009:21).

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: (Mardiasmo, 2009:21)

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah : (Inpres No. 7 Tahun 1999)

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup: (Inpres No. 7 Tahun 1999)

- a. Tugas Pokok dan fungsi instansi pemerintah.

- b. Program kerja yang menjadi isu nasional.
- c. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut diatas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada presiden. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan: (Inpres No. 7 Tahun 1999)

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan stratejik.
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah.
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional, dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintahan.
- d. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama.
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
 - 1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target.
 - 2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan
 - 1) menganalisis hasil pengukuran kinerja;

- 2) Menginterpretasikan data yang diperoleh;
- 3) Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program;
- 4) Membandingkan pencapaian kegiatan, program dan kebijaksanaan dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 di atas secara singkat Implementasi (pelaksanaan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dituangkan dalam Renstra dan LAKIP.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003)

1) Perencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan.

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,

visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategik.

4) Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rukmi (2013) yang berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Rumusan Masalah adalah bagaimana pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian adalah implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa

implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar akuntansi pemerintahan yang baik dan sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*, sesuai dengan PP no 24 tahun 2005.

Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu terletak pada variabel X yaitu mengenai kualitas laporan keuangan. Dan terdapat perbedaan variabel Y dengan penelitian sekarang yang membahas akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan perbedaan juga terletak pada objek penelitian, penelitian saat ini dilakukan di kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dodi (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.

Terdapat persamaan variabel X dan Y dengan penelitian sekarang yaitu mengenai kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan terdapat perbedaan pada objek penelitian yang sekarang berada di kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Komang (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Rumusan masalah yaitu apakah terdapat

pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terdapat persamaan variabel Y pada penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel X membahas kualitas laporan keuangan dan Objek penelitian berada di kabupaten Ogan Ilir.

C. Kerangka Pemikiran

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis, 2017

D. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Urip, 2008:33).

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proposisi di samping proposisi-proposisi lainnya. Hipotesis dapat dideduksi dari proposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pertanyaan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran (Anwar, 2011:44). Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. H_1 = Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat di kategorikan beberapa macam yaitu :
(Anwar, 2011:13-19)

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

2. Penelitian Kausalitas

Penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.

3. Penelitian Korelasional

Penelitian korelasional adalah desain penelitian yang dirancang untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi.

4. Penelitian Tindakan

Penelitian tindakan adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

5. Penelitian Eksperimental Yang Sebenarnya

Penelitian Eksperimental Yang Sebenarnya adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas

mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak dikenai perlakuan.

6. Penelitian Eksperimental Semu

Penelitian eksperimental semu adalah desain penelitian yang disusun untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan semua variabel yang relevan.

7. Penelitian Grounded

Penelitian grounded menggunakan fakta atau data empiris untuk menyusun proposisi-proposisi, menemukan konsep-konsep dan membuktikan serta mengembangkan teori.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu jenis penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel dan juga untuk mengetahui nilai pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Indralaya Raya Tanjung Senai.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi subjek dalam penelitian yang diamati. Dari metode penelitian diatas, penelitian membuat tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas Laporan Keuangan (X)	Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	a. Relevan b. Andal c. Dapat di bandingkan d. Dapat di pahami	Skala Ordinal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Y)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	a. Perencanaan Strategik b. Perencanaan Kinerja c. Pengukuran Kinerja d. Pelaporan Kinerja	Skala Ordinal

Sumber : Penulis, 2017

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu

menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Anwar, 2011:87).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 35 pegawai/responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik sampling jenuh atau sensus, artinya semua populasi dijadikan sampel.

E. Data yang Diperlukan

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:
(Anwar, 2011:104)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden instansi pemerintahan terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui opini BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK RI.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
(Anwar, 2011:105-114)

1. Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Cara survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu
 - a. Wawancara
Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
 - b. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.
2. Cara observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), subjek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
3. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia dilokasi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada salah satu pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Teknik kuesioner dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebarkan kuesioner kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data opini BPK dari Situs Resmi BPK RI.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Semua data, yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi dua (Kuncoro, 2013: 145) yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.

Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan *Statistic Program For Special Science (SPSS)* yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2010:132) yaitu :

- a. Skala *Likert*
- b. Skala Gutman
- c. *Rating Scale*
- d. *Semantic Deferential*

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala *likert* dapat berupa kata-kata, yaitu :

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4

Netral	= N	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbantuan ordinal dinaikan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval menggunakan *software* (program) MSI (*Microsoft successif Interval*).

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah analisis regresi liner sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*Ordinary Least Square*) maka lebih terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan uji realibilitas.

a. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010 : 172). Dengan menggunakan instrumen yang valid diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid, jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid.

Uji validitas kuesioner biasanya dimaksud adalah validitas item, yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item (Duwi, 2016 : 51). Metode pengujian validitas item pada SPSS yang bisa digunakan yaitu dengan metode korelasi *Pearson* atau metode *Corrected item-Total Correlation*.

Nilai korelasi r hitung dibandingkan dengan r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data $(n) = 15$ atau $df(n-2)$ atau $(15-2)$ maka didapat r tabel sebesar 0,514

(Duwi, 2016 : 56). Jadi apabila r hitung lebih besar dari r tabel dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai r hitung lebih kecil dari r tabel dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dapat ditemukan bahwa pernyataan dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan r hitung lebih besar dari r tabel, maka selanjutnya pernyataan dan pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut, diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah instrument reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6 (Duwi, 2016 : 60).

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software* SPSS. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Imam, 2013 : 48).

c. Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu :

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_{0.1} : Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara parsial/individu.

H_{a.1} : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja secara parsial/individu.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

- 1) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika P value < 5% , H_0 diterima jika P value > 5%.

2) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$.

d. Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Hasil perhitungan *R Square* dapat dilihat pada *output* model *summary*. Pada kolom *R Square* dapat diketahui berapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

e. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana terdiri atas dua variabel. Satu variabel yang berupa variabel terikat/tergantung diberi simbol Y dan variabel kedua yang berupa variabel bebas diberi simbol X. Regresi sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua

variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat nilai berdasarkan nilai variabel bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi nilai variabel Y disebut dengan persamaan regresi. Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan dengan persamaan matematika, yaitu : (Anwar, 2011:131-132)

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X

a = titik potong Y, merupakan nilai bagi Y ketika X = 0

b = kemiringan atau slope atau perubahan rata-rata dalam y untuk setiap perubahan dari satu unit X baik berupa peningkatan maupun penurunan

X = nilai variabel X yang dipilih

Nilai b (koefisien regresi) dan a (konstanta) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$b = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} - b \frac{\Sigma X}{n}$$

n = jumlah pengamatan(sampel);

X = nilai variabel bebas; dan

Y = nilai variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir berdiri sejak tanggal 07 Januari 2004 sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Masa 5 tahun pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-2015 sesuai dengan amanah RPJM Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 telah melaksanakan tugas umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Jumlah desa terbanyak Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa, Kecamatan Indralaya 17 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Tanjung Raja dengan 15 desa dan 4 kelurahan serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

Kabupaten Ogan Ilir memiliki tujuh badan pemerintahan salah satunya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten

Ogan Ilir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengelola keuangan aset daerah. Badan pengelola keuangan aset daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengelolaan keuangan aset daerah.

b. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

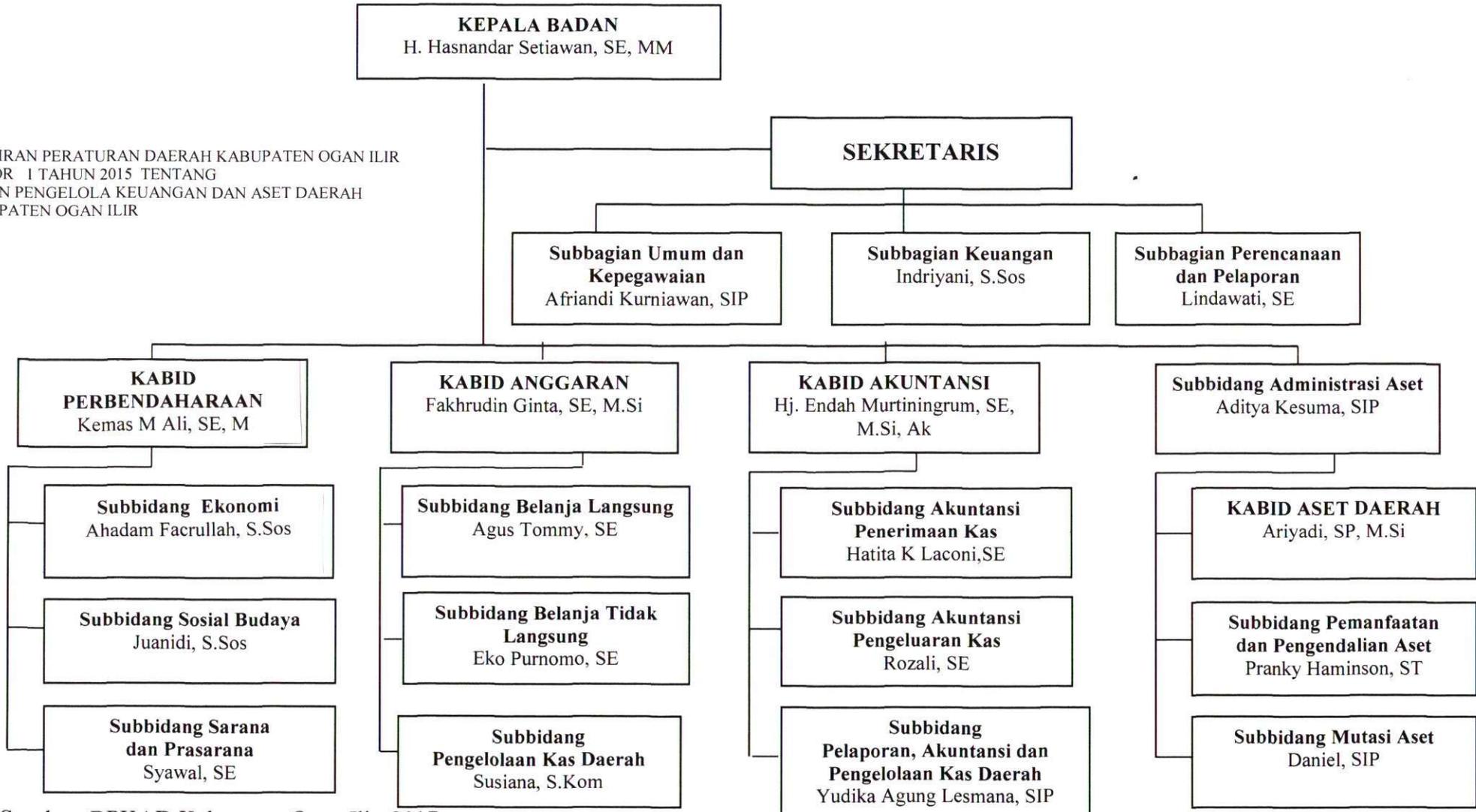
Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan diantara masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung jawabnya.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dalam suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah dalam unit organisasi tersebut.

Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, 2017

c. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 yang telah ditetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir adalah Terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Visi Misi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana pemerintahan yang bersih yang dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam hal memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengelolaan keuangan aset daerah. Fungsi kepala badan adalah:

- a) Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten.
- b) Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- c) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kabupaten.
- d) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah Kabupaten.
- e) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
- f) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten.
- g) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
- h) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten.

- i) Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten.
- j) Pengelolaan, perencanaan dan pelaporan DAK.
- k) Pengelolaan, Pengendalian dan pelaporan DBH Kabupaten.
- l) Menyampaikan laporan keuangan dan neraca per 31 Desember kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan RKA dan RKA perubahan SKPD
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran.
- c) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPD.
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD.

- e) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPD.
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah SKPD.
- g) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD.
- h) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- i) Pengelolaan urusan rumah tangga
- j) Pengelolaan kearsipan.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan penyusunan program anggaran perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan menyiapkan bahan teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.

- b) Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
- c) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA, RKAP, DPA dan DPAP.
- e) Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- g) Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD.
- i) Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD.
- j) Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD.
- k) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka penyusunan program.
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD.

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4) Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, retuisi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi daerah dan akuntansi SKPD.
- b) Melaksanakan pengujian rekening belanja atas SP2D.
- c) Melaksanakan restitusi/pengembalian pendapatan daerah.
- d) Melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Menyusun laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan.
- f) Melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- g) Menyajikan informasi keuangan daerah.

- h) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan.
- i) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait.
- j) Melaksanakan koreksi jurnal penerimaan.
- k) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi pengeluaran.
- l) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran dengan SKPD terkait.
- m) Melaksanakan koreksi jurnal pengeluaran.
- n) Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prognosis 6 bulan berikutnya.
- o) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban APBD.
- p) Kepala Bidang Akuntansi

5) Kepala Bidang Aset Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan peraturan tata laksana barang milik daerah (BMD).
- b) Melaksanakan pendataan, penatausahaan barang milik daerah.

- c) Menyusun tata cara penuntutan ganti rugi barang milik daerah.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan BMD.
- e) Melaksanakan pengamanan, pengendalian sertifikasi, BPDB dan STNK BMD.
- f) Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda.
- g) Menyusun harga satuan umum.
- h) Melakukan penilaian dan penghapusan BMD.
- i) Menghimpun laporan mutasi barang milik daerah dan pengguna barang.
- j) Menyusun laporan pembukuan, penambahan, pengurangan dan pemindahtanganan BMD.
- k) Melakukan pembinaan pelaporan BMD.
- l) Menyusun buku induk inventarisasi barang tahunan dan pengguna barang.

2. Gambaran Karakteristik Responden

Penelitian ini didasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah dibagikan kepada seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, kuesioner yang disebar

sebanyak 35 kuesioner dan jumlah kuesioner seluruhnya kembali dan layak dijadikan sumber data.

Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Adapun gambaran umum responden disajikan dalam tabel VI.1 berikut :

Tabel IV.1
Gambaran Umum Responden

Uraian	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
Pria	22	63%
Wanita	13	37%
Umur		
20-30	7	20%
31-40	17	49%
41-50	11	31%
Tingkat Pendidikan		
SMA	2	6%
D3	6	17%
S1	22	63%
S2	5	14%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017

Dari tabel IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan jenis kelaminnya, sebagian besar responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 22 orang sedangkan, responden wanita sebanyak 13 orang. Berdasarkan umur responden, maka rata-rata umur responden antara 31-40, hal ini dilihat dari presentase umur responden yaitu sebesar 49%. Dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas responden berasal dari tamatan S1, yaitu sebanyak 22 orang. Hal ini berarti bahwa, pola pikir dari pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir telah cukup memadai untuk mampu menjalankan tugasnya.

3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 2 variabel, 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah Kualitas Laporan Keuangan (X) dan variabel terikat adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y).

Butir pernyataan pada variabel bebas (X) berjumlah 15 pernyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Butir pernyataan pada variabel terikat (Y) berjumlah 4 indikator yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tujuan diberikan pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban responden dijumlahkan berdasarkan variabel masing-masing responden. Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang Kualitas Laporan Keuangan (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dilihat dari tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2
Hasil Total Jawaban Responden

Responden	Data Ordinal		Data Interval	
	X	Y	X	Y
1	63	43	42,011	21,418
2	69	45	49,969	24,572
3	66	41	45,708	18,219
4	75	49	58,332	30,522

5	51	40	25,710	16,588
6	53	43	30,330	22,358
7	56	38	32,244	13,605
8	73	50	55,601	32,125
9	73	50	55,601	32,125
10	64	47	43,406	27,501
11	60	40	37,586	16,588
12	55	38	31,446	14,120
13	72	49	54,163	30,713
14	59	48	36,265	28,988
15	63	43	42,011	21,418
16	59	48	36,017	29,022
17	59	44	36,456	22,594
18	65	47	45,205	27,484
19	60	45	37,586	24,282
20	48	42	21,963	19,654
21	75	50	58,332	32,125
22	69	49	50,104	30,713
23	69	49	50,104	30,713
24	60	45	37,586	24,523
25	65	47	44,464	27,682
26	70	47	51,268	27,405
27	70	43	51,268	21,420
28	66	45	45,613	24,325
29	60	40	37,586	16,588
30	50	45	24,776	24,348
31	53	40	29,331	16,588
32	75	46	58,332	27,490
33	58	40	34,932	16,588
34	58	45	35,635	24,770
35	58	45	35,635	24,770

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Untuk melihat hasil jawaban responden dari hasil tabulasi yang lebih rinci dapat dilihat di lampiran III, karena syarat untuk melakukan analisis regresi, data harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan menggunakan program (*software*) MSI (*Microsoft Successive Interval*).

4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir dinilai dengan menggunakan tabelaris dengan kuesioner yang diterima sebanyak 35 yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X)

Kualitas laporan keuangan diukur dengan 15 item pernyataan, adapun analisis deskriptif hasil jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Analisis jawaban Responden
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	4	11	23	66	8	23	-	-	-	-
P2	9	26	18	51	8	23	-	-	-	-
P3	14	40	16	46	5	14	-	-	-	-
P4	12	34	18	52	5	14	-	-	-	-
P5	6	17	18	51	9	26	2	6	-	-
P6	14	40	18	51	3	9	-	-	-	-
P7	13	37	14	40	8	23	-	-	-	-
P8	17	48,5	17	48,5	1	3	-	-	-	-
P9	17	49	13	37	5	14	-	-	-	-
P10	11	31	17	49	7	20	-	-	-	-
P11	10	29	20	57	4	11	1	3	-	-
P12	8	23	23	66	4	11	-	-	-	-
P13	17	48	15	43	2	6	1	3	-	-
P14	15	43	19	54	1	3	-	-	-	-
P15	12	34	21	60	2	6	-	-	-	-

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 di atas hasil jawaban responden mengenai indikator kualitas laporan keuangan terlihat pada pernyataan pertama yaitu, laporan keuangan yang dibuat oleh

BPKAD disajikan tepat waktu. Diketahui sebanyak 4 atau 11% responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 23 atau 66% responden yang menyatakan setuju, hal ini dapat dilihat dari alasan responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD disajikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sebanyak 8 atau 23% responden yang menyatakan netral dengan alasan terkadang laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu.

Pernyataan kedua dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan disajikan secara jujur. Sebanyak 9 atau 26% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan yang berkualitas akan disajikan secara jujur. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan pada dasarnya laporan keuangan harus disajikan secara jujur karena sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebanyak 8 atau 23% responden yang menyatakan netral dengan alasan laporan keuangan yang dibuat terkadang tidak disajikan dengan jujur dengan alasan tertentu.

Pernyataan ke tiga dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan yang dibuat BPKAD sesuai dengan sasaran yang akan diukur. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju dan sebanyak 16 atau 46% responden menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan yang dibuat harus sesuai sasaran yang diukur. Sebanyak 5 atau 14% responden yang menyatakan netral

dengan alasan tidak semua laporan keuangan dibuat sesuai dengan sasaran yang diukur.

Pernyataan keempat dari tabel IV.3 yaitu, Laporan Keuangan BPKAD disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi. Sebanyak 12 atau 34% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwasanya laporan keuangan harus disajikan berdasarkan informasi akuntansi. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan memang sudah seharusnya disajikan memuat informasi akuntansi. Sebanyak 5 atau 14% responden yang menyatakan netral dengan alasan membuat laporan keuangan tidak semuanya harus memuat informasi akuntansi didalamnya.

Pernyataan ke lima dari tabel IV.3 yaitu, penyajian laporan keuangan BPKAD diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Sebanyak 6 atau 17% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan yang buat akan dipublikasikan untuk umum. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan yang dibuat harus disajikan kepada umum untuk mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah tersebut. Sebanyak 9 atau 26% responden yang menyatakan netral dengan alasan laporan keuangan yang dibuat terkadang tidak disajikan untuk kebutuhan umum. Sebanyak 2 atau 6% responden

menyatakan tidak setuju dengan alasan laporan keuangan dibuat untuk kepentingan beberapa pihak saja bukan untuk kepentingan umum.

Pernyataan ke enam dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan dapat membantu dalam mempekirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pada periode berikutnya. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan hal tersebut memang bertujuan untuk mengetahui aktivitas pemerintah yang berhubungan dengan keuangan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sebanyak 3 atau 9% yang menyatakan netral dengan alasan tidak semua laporan keuangan yang dihasilkan dapat memperkirakan aktivitas keuangan pada periode berikutnya.

Pernyataan ke tujuh dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan memberikan informasi untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Sebanyak 13 atau 37% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu memberikan informasi kepada pegawai setempat dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan pada masa lalu

akan memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan laporan keuangan pada masa kini dengan informasi yang telah dievaluasi dari laporan keuangan pada masa lalu. Sebanyak 8 atau 23% responden menyatakan netral dengan alasan laporan keuangan yang dihasilkan tidak dibuat dengan tepat sehingga informasi yang didapat salah sehingga akan menimbulkan masalah baru untuk masa kini.

Pernyataan ke delapan dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan BPKAD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode selanjutnya. Sebanyak 17 atau 48,5% responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan alasan laporan keuangan yang dihasilkan pada periode saat ini akan dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode yang lalu dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di periode yang lalu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pada periode sekarang lebih berkualitas. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan netral dengan alasan pada laporan keuangan yang dihasilkan pada periode saat ini masih sebanding dengan periode sebelumnya sehingga tidak terjadi peningkatan pada periode saat ini.

Pernyataan ke sembilan dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan BPKAD dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Sebanyak 17 atau 49% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan disajikan harus

berkualitas sehingga mampu membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang benar. Sebanyak 13 atau 37% responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah berguna dalam pengambilan keputusan. Sebanyak 5 atau 14% responden yang menyatakan netral dengan alasan ketika laporan keuangan yang disajikan secara tidak jujur maka keputusan yang diambil akan salah sehingga akan berdampak yang tidak baik untuk pemerintah tersebut.

Pernyataan ke sepuluh dari tabel IV.3 yaitu, informasi dalam laporan keuangan BPKAD dapat diuji. Sebanyak 11 atau 31% responden menyatakan sangat setuju ketika laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji itu berarti laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Sebanyak 17 atau 49% responden yang menyatakan setuju dengan alasan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut dapat diuji kebenarannya. Sebanyak 7 atau 20% responden yang menyatakan netral dengan alasan ada laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas sehingga tidak perlu diuji lagi kebenarannya.

Pernyataan ke sebelas dari tabel IV.3 yaitu, informasi yang disajikan dalam laporan BPKAD digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebanyak 10 atau 29% responden yang

menyatakan sangat setuju dengan alasan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dilihat berkualitas atau tidaknya sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan setuju dengan alasan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut meningkat otomatis laporan keuangan yang dihasilkan pasti berkualitas. Sebanyak 4 atau 11% responden menyatakan netral dengan alasan peningkatan akuntabilitas kinerja dapat diukur tidak hanya dari informasi di dalam laporan keuangan saja. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan tidak setuju karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyataan ke duabelas dari tabel IV.3 yaitu, kualitas laporan keuangan untuk mengukur target. Sebanyak 8 atau 23% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan target dapat ditentukan dengan melihat kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sebanyak 23 atau 66% responden yang menyatakan setuju dengan alasan dengan melihat laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas atau tidak, dapat mengukur target yang akan dicapai. Sebanyak 4 atau 11% responden yang menyatakan netral dengan alasan tidak hanya kualitas laporan keuangan yang dapat mengukur target yang akan dicapai.

Pernyataan ke tigabelas dari tabel IV.3 yaitu, kualitas laporan keuangan untuk mengukur sasarnya. Sebanyak 17 atau 48% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan berkualitas atau tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan untuk mengukur sasarnya. Sebanyak 15 atau 43% responden yang menyatakan setuju dengan alasan untuk menyusun sasarnya laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas. Sebanyak 2 atau 6% yang menyatakan netral dengan alasan untuk mengukur sasaran tidak hanya dilihat dari berkualitas atau tidaknya laporan keuangan yang telah dihasilkan. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan tidak setuju dengan alasan laporan keuangan tidak mampu mengukur sasarnya.

Pernyataan ke empatbelas dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan dinyatakan dengan istilah yang mudah dipahami. Sebanyak 15 atau 43% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan dibuat berdasarkan SAP yang berlaku sehingga mudah dipahami. Sebanyak 19 atau 54% responden yang menyatakan setuju dengan alasan istilah yang dimuat didalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang berlaku sehingga akan mudah dipahami. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan netral dengan alasan masih ada laporan keuangan dibuat dengan menggunakan istilah yang sulit dipahami.

Pernyataan ke limabelas dari tabel IV.3 yaitu, informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna. Sebanyak 12 atau 34% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan harus dapat dipahami dengan menggunakan penulisan dan bahasa yang baik dan benar. Sebanyak 21 atau 60% responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan harus mudah dipahami oleh orang lain agar supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan keputusan. Sebanyak 2 atau 6% responden yang menyatakan netral dengan alasan masih terdapat bahasa yang sukar dipahami oleh pengguna dalam menyajikan informasi di dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tentang kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan sudah dapat diuji kebenarannya, kejujurannya dan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Dengan laporan keuangan yang berkualitas itu berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi terkait. Serta laporan keuangan harus menggunakan informasi akuntansi sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan periode sekarang. Laporan keuangan dibuat agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah terkait.

b. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 10 item pernyataan. Adapun analisis deskriptif hasil jawaban responden variabel akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.4
Analisis jawaban Responden
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	17	48,5	17	48,5	1	3	-	-	-	-
P2	18	51	17	49	-	-	-	-	-	-
P3	22	63	13	37	-	-	-	-	-	-
P4	14	40	21	60	-	-	-	-	-	-
P5	20	57	15	43	-	-	-	-	-	-
P6	17	49	18	51	-	-	-	-	-	-
P7	14	40	20	57	1	3	-	-	-	-
P8	23	66	12	34	-	-	-	-	-	-
P9	19	54	14	40	2	4	-	-	-	-
P10	11	31	20	57	3	9	1	3	-	-

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 di atas hasil jawaban responden mengenai indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terlihat pada pernyataan pertama yaitu, adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program atau kegiatan. Sebanyak 17 atau 48,5% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwasanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program atau kegiatan itu harus ada agar sistem kerja berjalan dengan baik. Sebanyak 17 atau 48,5% responden yang menyatakan setuju dengan alasan hal tersebut sudah berkaitan karena pencapaian kinerja dinilai dari program atau kegiatan yang dijalankan. Sebanyak 1 atau 3%

responden yang menyatakan netral dengan alasan hal itu tidak terlalu bernilai bagi kinerja instansi pemerintah.

Pernyataan kedua dari tabel IV.4 yaitu, kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan pemerintah harus bersikap terbuka terhadap alokasi penggunaan anggaran. Sebanyak 17 atau 49% responden yang menyatakan setuju dengan alasan bahwa pada dasarnya anggaran bersifat sensitif dan harus memiliki kejelasan.

Pernyataan ketiga dari tabel IV.4 yaitu, visi dan misi program selalu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. Sebanyak 22 atau 63% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan agar mengetahui tujuan dari program tersebut. Sebanyak 13 atau 37% responden yang menyatakan setuju dengan alasan agar sistem kerja pemerintah berkesinambungan antara visi dan misi program dengan sasaran program atau kegiatan yang ada.

Pernyataan ke empat dari tabel IV.4 yaitu, indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. Sebanyak 20 atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan indikator kinerja digunakan untuk menilai kinerja yang telah dijalankan dari program atau kegiatan tersebut. Sebanyak 21 atau 60% responden yang menyatakan setuju dengan alasan lebih

memaksimalkan dan bisa menghasilkan laporan dengan lebih baik yang sesuai dengan indikator.

Pernyataan ke lima dari tabel IV.4 yaitu, melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan agar dapat mengukur dan mengetahui hasil pencapaian kinerja setiap kegiatan atau program keuangan yang dilaksanakan. Sebanyak 15 atau 43% responden yang menyatakan setuju dengan alasan hal tersebut dilakukan agar lebih efektif dan efisien karena bisa mengukur seberapa besar hasil pencapaian program atau kegiatan keuangan yang dilaksanakan.

Pernyataan ke enam dari tabel IV.4 yaitu, membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Sebanyak 17 atau 49% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban dari pegawai kepada pimpinannya untuk mengetahui kinerja para pegawainya.

Pernyataan ke tujuh dari tabel IV.4 yaitu, melakukan pengecekan terhadap jalannya program. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan untuk mengetahui apakah program tersebut memang benar-benar

dilakukan atau hanya sekedar laporan yang diberikan oleh aparat. Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan setuju dengan alasan karna pengecekan harus dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak progam telah dijalankan oleh aparat pemerintah. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan netral dengan alasan dapat mengganggu kinerja apabila mengecek pada saat program sedang berjalan.

Pernyataan ke delapan dari tabel IV.4 yaitu, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. Sebanyak 23 atau 66% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan dengan indikator kinerja yang ada maka program atau kegiatan memiliki kejelasan penilaian kinerjanya. Sebanyak 12 atau 34% responden yang menyatakan setuju dengan alasan penilaian kinerja sudah seharusnya memiliki indikator penilaian agar supaya lebih efektif dan baik.

Pernyataan ke sembilan dari tabel IV.4 yaitu, kegiatan atau program yang disusun telah diakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Sebanyak 19 atau 54% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan program atau kegiatan dibuat untuk masyarakat harus sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan setuju dengan alasan lebih mengetahui apa yang menjadi keluhan

dan keinginan masyarakat. Sebanyak 2 atau 6% responden yang menyatakan tidak setuju dengan alasan bisa dilakukan sejalan dengan program ditahun sebelumnya.

Pernyataan ke sepuluh dari tabel IV.4 yaitu, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program atau kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebanyak 11 atau 31% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan LAKIP dasar penilaian dan sebagai bahan pertimbangan. Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan setuju dengan alasan pemerintah lebih bisa melakukan perencanaan program atau kegiatan dengan banyak pertimbangan. Sebanyak 4 atau 9% responden yang menyatakan netral dengan alasan pada dasarnya program yang direncanakan bisa saja dilakukan tepat waktu dan bisa juga tidak. Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan tidak setuju dengan alasan bisa dilakukan tepat waktu bisa tidak karena adanya kendala kerja pada saat dipemerintahan.

Berdasarkan uraian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat disimpulkan pada dasarnya kinerja pemerintah memiliki indikator penilaian tersendiri dengan alasan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas serta terlaksana atau tidaknya program atau kegiatan yang telah dibuat bisa mnejadi tolak ukur dalam penilaian keberhasilan atau

kegagalan suatu instansi pemerintah dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Hasil Pengelolaan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel apabila r_{hitung} dari pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} . Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif tersebut berarti bahwa r_{hitung} (nilai korelasi yang akan digunakan untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari r_{tabel} .

Nilai r_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% dan $n = 35$ adalah 0,325. Jadi, apabila r_{hitung} lebih kecil dari 0,325 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid.

a. Kualitas Laporan Keuangan (X)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5
Hasil Pengujian Validitas Variabel X

Butir Pernyataan	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Status
1	0,709	0,325	Valid
2	0,746	0,325	Valid
3	0,791	0,325	Valid
4	0,739	0,325	Valid
5	0,730	0,325	Valid
6	0,757	0,325	Valid
7	0,663	0,325	Valid
8	0,833	0,325	Valid
9	0,874	0,325	Valid
10	0,841	0,325	Valid
11	0,820	0,325	Valid
12	0,675	0,325	Valid
13	0,682	0,325	Valid
14	0,669	0,325	Valid
15	0,875	0,325	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 15 butir pernyataan dari variabel kualitas laporan keuangan (X) didapatkan hasil bahwa 15 butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,325.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variable Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Hasil Pengujian Validitas Variabel Y

Butir Pernyataan	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Status
1	0,584	0,325	Valid
2	0,756	0,325	Valid
3	0,779	0,325	Valid
4	0,624	0,325	Valid

5	0,594	0,325	Valid
6	0,739	0,325	Valid
7	0,758	0,325	Valid
8	0,679	0,325	Valid
9	0,761	0,325	Valid
10	0,463	0,325	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 10 butir pernyataan dari variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) didapatkan hasil bahwa butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,325.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pernyataan dalam variabel X dan Y, didapatkan seluruh butir pernyataan yang valid. Variabel X memiliki 15 butir pernyataan yang valid dan variabel Y memiliki 10 butir pernyataan yang valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian dengan cara mengkorelasikan skor ganjil dan skor genap. Hasil pengujian reliabilitas menerangkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* item $>$ nilai alpha maka reliabel, sedangkan jika nilai *Cronbach's Alpha* item $<$ nilai alpha maka tidak reliabel. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7

dapat diterima, dan 0,8 adalah baik. Dari program SPSS yang digunakan, hasil yang diperoleh dalam pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>r</i> tabel	Status
X	0,948	0,7	Reliabel
Y	0,864	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai *r product moment* (r_{tabel}). Oleh karena itu, seluruh butir pernyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, maka dapat dipastikan beberapa butir, yang lulus dalam uji validitas dan uji reliabilitas, merupakan data yang valid dan reliabel. Data yang valid dan reliabel tersebut baru dapat digunakan sebagai data, yang akan diolah untuk melakukan analisis pada tahap berikutnya.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel terikat.

Untuk melakukan uji regresi linear sederhana ini dengan SPSS 21 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel IV.8:

Tabel IV.8
Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	8.610	3.002	
1 Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

$$Y = a + b_1 X_1$$

$$Y = 8,610 + 0,371$$

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa:

Nilai koefisien regresi kualitas laporan keuangan (X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), adalah sebesar 0,371 (37,1%), berarti bahwa kualitas laporan keuangan (X) mempunyai hubungan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), yaitu sebesar 37,1%, artinya jika ada peningkatan kualitas laporan keuangan (X) sebesar 100 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 37,1%, begitu juga sebaliknya jika ada penurunan kualitas laporan keuangan (X) sebesar 100%, maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 37,1%. Jadi kualitas laporan keuangan

berhubungan positif secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Uji Hipotesis t

Untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimanakah pengaruh kualitas laporan keuangan (X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.610	3.002		2.868	.007
1 Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679	5.310	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel kualitas laporan keuangan (X) sebesar 5,310 sedangkan, nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n-k-1$ ($35-1-1$) = 33 adalah sebesar 1,692. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai t_{hitung} $5,310 > t_{tabel}$ 1,692.

Hasil uji hipotesis individual untuk variabel kualitas laporan keuangan (X) menunjukkan bahwa variabel tersebut

secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Hal ini dapat di gambarkan dengan diterimanya H_a dan ditolaknya H_0 serta nilai signifikansi X 0,000 lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*. *R Square* dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut :

Tabel IV.10
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.461	.444	4.135

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 diperoleh nilai *R Square* 0,461 atau 46,1%. Hasil ini berarti 46,1% variabel Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis deskripsi jawaban responden atas item pernyataan kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil tabulasi skor jawaban tersebut, tampak terlihat bahwa responden cenderung memilih jawaban variabel kualitas laporan keuangan pada kisaran skor 4, 5 dan 3. Dari ke 15 item pernyataan terlihat bahwa pada item pernyataan ke delapan yaitu mengenai, laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Terlihat bahwa kecenderungan responden menjawab pada skor 5 dan 4 sebanyak 17 atau 48,5% responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan alasan laporan keuangan yang dihasilkan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang benar.

Hasil analisis deskripsi jawaban responden atas item pernyataan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil tabulasi skor jawaban tersebut, tampak terlihat bahwa responden cenderung memilih jawaban variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kisaran skor 4 dan 5. Dari ke 10 item pernyataan terlihat bahwa pada item pernyataan ke

delapan yaitu mengenai, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. Terlihat bahwa kecenderungan responden menjawab pada skor 5 dan 4 sebanyak 66% responden menyatakan sangat setuju dan 34% responden menyatakan setuju dengan alasan kinerja sudah seharusnya memiliki indikator penilaian agar akuntabilitas kinerja pemerintah berjalan lebih efektif untuk kesuksesan dari kegiatan atau program itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan (X) secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja pemerintah salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah juga dapat dikatakan berkualitas apabila laporannya mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apabila laporan keuangan tersebut mendapatkan opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar.

Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, yang berarti laporan keuangan pemerintah akan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah tersebut, laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk atau pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk pembuatan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2015) yang membuktikan bahwa standar akuntansi

pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa kualitas laporan keuangan (X) secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja pemerintah salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, maka penulis memberikan saran bagi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan bagi para pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang standar akuntansi pemerintah dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga, dengan berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan maka pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja pemerintah juga meningkat.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi dengan menambah variabel penelitian atau mencoba dengan variabel lain agar penelitian ini dapat berkembang, atau dengan memperluas objek penelitian dengan memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. (2011). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Budi Santoso. (2015). *Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Deddi Nordiawan. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dodi Fs Lumentut, Sahmin Noholo dan Amir Lukum. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*. Vol 12, No. 2. <http://kim.ung.ac.id>. Diakses 30 November 2016.
- Duwi Priyatno. (2016). *SPSS Handbook*. Yogyakarta : MediaKom.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Erlangga.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala LAN No.239/LX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2003). Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara.
- Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)*. Vol 2 No. 1. <http://ejournal.undiksha.ac.id>. Diakses 30 November 2016.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nugraeni dan M. Budiantara. (2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas*. JDEB. Vol 12 No. 1. <http://ejournal.unisnu.ac.id>. Di akses 30 November 2016.

Rukmi Juwita. (2014). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika. Vol 12, No. 2. <http://jurnal.fe.unpas.ac.id>. Diakses 14 Desember 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. (2012). Bandung : Fokusmedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003

Urip Santoso, (2008). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud*. Vol 4, No. 1. <http://journal.unpar.ac.id>. Diakses 30 November 2016.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.

www.bpk.co.id

Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan	■	■																		
Laporan Survei Pendahuluan			■	■																
Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal									■											
Revisi Seminar										■	■									
Pengambilan Data												■								
Pengolahan Data Analisis													■							
Hasil Penelitian														■						
Penggandaan Penelitian															■					
Ujian Komprehensif																■				
Perbaikan Skripsi																	■	■	■	■

DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
4. Pendidikan :
- SMA
- Diploma 3
- Strata 1
- Strata 2
- Lainnya

Petunjuk Pengisian:

- a. Isilah semua nomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan.
- b. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau \surd) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor pernyataan).
- c. Pilihan jawaban:
 - Sangat Setuju (SS)
 - Setuju (S)
 - Netral (N)
 - Tidak Setuju (TS)
 - Sangat Tidak Setuju (STS)

Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan (X)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD disajikan tepat waktu.					
2	Laporan keuangan disajikan secara jujur.					
3	Laporan keuangan yang dibuat BPKAD sesuai dengan sasaran yang akan diukur.					
4	Laporan keuangan BPKAD disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi.					
5	Penyajian laporan keuangan BPKAD diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
6	Laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan dapat membantu dalam mempekirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya.					
7	Laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan memberikan informasi untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.					
8	Laporan keuangan BPKAD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
9	Laporan keuangan BPKAD dapat membantu dalam pengambilan keputusan.					
10	Informasi dalam laporan keuangan BPKAD dapat diuji.					
11	Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan BPKAD digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.					
12	Kualitas laporan keuangan untuk mengukur target.					
13	Kualitas laporan keuangan untuk mengukur sasarnya.					
14	Laporan keuangan dinyatakan dengan istilah yang mudah dipahami.					
15	Informasi yang di sajikan didalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna.					

Kuesioner Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.					
3	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

DATA ORDINAL VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (X)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	JUMLAH
1	4	3	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	63
2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	69
3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	66
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	51
6	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	2	4	2	4	4	53
7	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	56
8	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	73
9	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	73
10	4	4	5	5	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	64
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
12	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	55
13	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	72
14	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	3	5	5	4	59
15	4	3	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	63
16	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	59
17	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
18	4	4	4	4	3	5	4	5	5	3	5	4	5	5	5	65
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	48
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
22	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	69
23	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	69
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
25	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	65
26	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	70
27	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	70
28	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	66
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
30	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	50
31	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	53
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	58
34	3	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	58
35	3	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	58

DATA ORDINAL VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JUMLAH
1	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
2	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	45
3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	5	4	5	5	5	4	4	4	5	2	43
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	47
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
14	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
15	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
16	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
17	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
18	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	47
19	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	45
20	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
24	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
25	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	47
26	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
27	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43
28	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	45
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	45
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	46
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	5	4	5	4	5	5	4	5	5	3	45
35	5	4	5	4	5	5	4	5	5	3	45

DATA INTERVAL VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (X)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	Total
1	2,490	1,000	3,545	3,652	3,202	2,380	1,000	4,108	3,400	2,246	3,087	2,524	4,108	2,684	2,585	42,011
2	2,490	2,285	2,228	2,304	4,490	3,793	3,342	4,108	3,400	3,529	3,087	2,524	4,108	4,203	4,078	49,969
3	2,490	2,285	2,228	3,652	3,202	2,380	3,342	4,108	3,400	3,529	3,087	4,015	2,722	2,684	2,585	45,708
4	4,015	3,578	3,545	3,652	4,490	3,793	3,342	4,108	3,400	3,529	4,477	4,015	4,108	4,203	4,078	58,332
5	2,490	1,000	1,000	1,000	3,202	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,087	2,524	2,722	2,684	1,000	25,710
6	2,490	2,285	2,228	2,304	1,000	2,380	2,135	2,601	2,114	1,000	1,000	2,524	1,000	2,684	2,585	30,330
7	1,000	2,285	2,228	2,304	3,202	2,380	1,000	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	1,690	1,000	2,585	32,244
8	2,490	3,578	3,545	3,652	4,490	3,793	2,135	4,108	3,400	3,529	4,477	4,015	4,108	4,203	4,078	55,601
9	2,490	3,578	3,545	3,652	4,490	3,793	2,135	4,108	3,400	3,529	4,477	4,015	4,108	4,203	4,078	55,601
10	2,490	2,285	3,545	3,652	2,072	2,380	2,135	4,108	3,400	2,246	3,087	4,015	2,722	2,684	2,585	43,406
11	2,490	2,285	2,228	2,304	3,202	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	37,586
12	1,000	2,285	2,228	2,304	1,000	2,380	2,135	2,601	2,114	1,000	1,884	2,524	2,722	2,684	2,585	31,446
13	4,015	3,578	3,545	3,652	3,202	3,793	3,342	4,108	3,400	3,529	3,087	2,524	4,108	4,203	4,078	54,163
14	1,000	2,285	2,228	1,000	3,202	2,380	3,342	2,601	1,000	2,246	3,087	1,000	4,108	4,203	2,585	36,265
15	2,490	1,000	3,545	3,652	3,202	2,380	1,000	4,108	3,400	2,246	3,087	2,524	4,108	2,684	2,585	42,011
16	1,000	1,000	2,228	2,304	3,202	2,380	3,342	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	36,017
17	2,490	2,285	2,228	2,304	2,072	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	36,456
18	2,490	2,285	2,228	2,304	2,072	3,793	2,135	4,108	3,400	1,000	4,477	2,524	4,108	4,203	4,078	45,205
19	2,490	2,285	2,228	2,304	3,202	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	37,586
20	1,000	1,000	1,000	1,000	2,072	1,000	1,000	2,601	1,000	1,000	1,884	1,000	2,722	2,684	1,000	21,963
21	4,015	3,578	3,545	3,652	4,490	3,793	3,342	4,108	3,400	3,529	4,477	4,015	4,108	4,203	4,078	58,332
22	2,490	2,285	3,545	2,304	3,202	3,793	3,342	4,108	3,400	2,246	4,477	2,524	4,108	4,203	4,078	50,104
23	2,490	2,285	3,545	2,304	3,202	3,793	3,342	4,108	3,400	2,246	4,477	2,524	4,108	4,203	4,078	50,104
24	2,490	2,285	2,228	2,304	3,202	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	37,586
25	2,490	3,578	3,545	3,652	3,202	3,793	2,135	4,108	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	44,464
26	2,490	3,578	3,545	2,304	3,202	2,380	3,342	4,108	3,400	3,529	4,477	2,524	4,108	4,203	4,078	51,268
27	2,490	3,578	3,545	2,304	3,202	2,380	3,342	4,108	3,400	3,529	4,477	2,524	4,108	4,203	4,078	51,268
28	2,490	2,285	2,228	3,652	3,202	3,793	3,342	2,601	3,400	3,529	3,087	4,015	2,722	2,684	2,585	45,613
29	2,490	2,285	2,228	2,304	3,202	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	2,722	2,684	2,585	37,586
30	1,000	1,000	2,228	1,000	2,072	1,000	1,000	2,601	1,000	1,000	1,884	1,000	2,722	2,684	2,585	24,776
31	2,490	2,285	1,000	1,000	2,072	2,380	2,135	2,601	1,000	1,000	1,884	2,524	1,690	2,684	2,585	29,331
32	4,015	3,578	3,545	3,652	4,490	3,793	3,342	4,108	3,400	3,529	4,477	4,015	4,108	4,203	4,078	58,332
33	2,490	2,285	2,228	2,304	2,072	2,380	2,135	2,601	2,114	2,246	3,087	1,000	2,722	2,684	2,585	34,932
34	1,000	1,000	1,000	2,304	2,072	3,793	1,000	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	4,108	4,203	2,585	35,635
35	1,000	1,000	1,000	2,304	2,072	3,793	1,000	2,601	2,114	2,246	3,087	2,524	4,108	4,203	2,585	35,635

DATA INTERVAL VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
1	2,601	2,596	1,000	1,000	2,603	1,000	2,725	2,631	2,258	3,004	21,418
2	2,601	1,000	2,619	2,610	1,000	2,596	4,253	2,631	2,258	3,004	24,572
3	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	2,631	2,258	3,004	18,219
4	4,108	2,596	2,619	2,610	1,000	2,596	4,253	2,631	3,693	4,416	30,522
5	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	16,588
6	4,108	1,000	2,619	2,610	2,603	1,000	2,725	1,000	3,693	1,000	22,358
7	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,004	13,605
8	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	4,416	32,125
9	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	4,416	32,125
10	4,108	2,596	2,619	1,000	1,000	2,596	4,253	2,631	3,693	3,004	27,501
11	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	16,588
12	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	1,000	1,795	14,120
13	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	3,004	30,713
14	4,108	2,596	2,619	1,000	2,603	2,596	2,725	2,631	3,693	4,416	28,988
15	2,601	2,596	1,000	1,000	2,603	1,000	2,725	2,631	2,258	3,004	21,418
16	2,601	2,596	2,619	2,610	2,603	1,000	4,253	2,631	3,693	4,416	29,022
17	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,253	2,631	3,693	4,416	22,594
18	4,108	2,596	1,000	1,000	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	3,004	27,484
19	2,601	1,000	2,619	1,000	1,000	2,596	2,725	2,631	3,693	4,416	24,282
20	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	2,631	3,693	3,004	19,654
21	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	4,416	32,125
22	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	3,004	30,713
23	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	4,253	2,631	3,693	3,004	30,713
24	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	24,523
25	4,108	2,596	2,619	2,610	2,603	1,000	4,253	2,631	2,258	3,004	27,682
26	2,601	2,596	2,619	1,000	1,000	2,596	4,253	2,631	3,693	4,416	27,405
27	2,601	1,000	2,619	2,610	2,603	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	21,420
28	4,108	1,000	2,619	1,000	2,603	2,596	2,725	1,000	2,258	4,416	24,325
29	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	16,588
30	4,108	2,596	2,619	1,000	2,603	1,000	2,725	1,000	3,693	3,004	24,348
31	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	16,588
32	1,000	2,596	2,619	2,610	2,603	2,596	2,725	2,631	3,693	4,416	27,490
33	2,601	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,725	1,000	2,258	3,004	16,588
34	4,108	1,000	2,619	1,000	2,603	2,596	2,725	2,631	3,693	1,795	24,770
35	4,108	1,000	2,619	1,000	2,603	2,596	2,725	2,631	3,693	1,795	24,770

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (X)

		Correlations															
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.652**	.581**	.583**	.530**	.422*	.493**	.520**	.588**	.527**	.477**	.560**	.269	.334*	.539**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.012	.003	.001	.000	.001	.004	.000	.118	.050	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P2	Pearson Correlation	.652**	1	.638**	.480**	.497**	.506**	.632**	.560**	.497**	.634**	.547**	.491**	.235	.416*	.706**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.002	.002	.000	.000	.002	.000	.001	.003	.173	.013	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P3	Pearson Correlation	.581**	.638**	1	.695**	.522**	.412*	.468**	.818**	.752**	.583**	.611**	.433**	.474**	.340*	.693**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.014	.005	.000	.000	.000	.000	.009	.004	.046	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P4	Pearson Correlation	.583**	.480**	.695**	1	.469**	.601**	.278	.682**	.803**	.676**	.436**	.781**	.333	.171	.457**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000		.004	.000	.105	.000	.000	.000	.009	.000	.051	.325	.006	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P5	Pearson Correlation	.530**	.497**	.522**	.469**	1	.437**	.438**	.477**	.496**	.763**	.694**	.510**	.527**	.395*	.526**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.001	.004		.009	.009	.004	.002	.000	.000	.002	.001	.019	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P6	Pearson Correlation	.422*	.506**	.412*	.601**	.437**	1	.446**	.581**	.849**	.565**	.581**	.540**	.551**	.636**	.723**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.012	.002	.014	.000	.009		.007	.000	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P7	Pearson Correlation	.493**	.632**	.468**	.278	.438**	.446**	1	.458**	.494**	.611**	.469**	.352*	.289	.487**	.637**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005	.105	.009	.007		.006	.003	.000	.004	.038	.093	.003	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P8	Pearson Correlation	.520**	.560**	.818**	.682**	.477**	.581**	.458**	1	.841**	.598**	.613**	.462**	.612**	.526**	.773**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.004	.000	.006		.000	.000	.000	.005	.000	.001	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P9	Pearson Correlation	.588**	.497**	.752**	.803**	.496**	.649**	.494**	.841**	1	.714**	.680**	.671**	.576**	.464**	.754**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.002	.000	.003	.000		.000	.000	.000	.000	.005	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P10	Pearson Correlation	.527**	.634**	.583**	.676**	.763**	.565**	.811**	.598**	.714**	1	.650**	.601**	.536**	.470**	.636**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.004	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P11	Pearson Correlation	.477**	.547**	.611**	.436**	.694**	.581**	.469**	.613**	.680**	.650**	1	.475**	.738**	.641**	.736**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.000	.009	.000	.000	.004	.000	.000	.000		.004	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P12	Pearson Correlation	.560**	.491**	.433**	.781**	.510**	.640**	.352*	.462**	.671**	.601**	.475**	1	.187	.216	.429**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.009	.000	.002	.001	.038	.005	.000	.000	.004		.282	.212	.010	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P13	Pearson Correlation	.269	.235	.474**	.333	.527**	.651**	.289	.612**	.576**	.536**	.738**	.187	1	.835**	.633**	.682**
	Sig. (2-tailed)	.118	.173	.004	.051	.001	.001	.093	.000	.000	.001	.000	.282		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P14	Pearson Correlation	.334*	.416*	.340*	.171	.395*	.636**	.487**	.526**	.464**	.470**	.641**	.216	.835**	1	.729**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.050	.013	.046	.325	.019	.000	.003	.001	.005	.004	.000	.212	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P15	Pearson Correlation	.539**	.706**	.693**	.457**	.526**	.723**	.637**	.773**	.754**	.636**	.736**	.429**	.633**	.729**	1	.873**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.709**	.746**	.791**	.739**	.730**	.757**	.663**	.833**	.874**	.841**	.820**	.675**	.682**	.669**	.873**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.384*	.522**	.268	.500**	.430**	.387*	.158	.405*	-.113	.584**
	Sig. (2-tailed)		.023	.001	.119	.002	.010	.022	.364	.016	.517	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P2	Pearson Correlation	.384*	1	.436**	.443**	.545**	.373*	.560**	.502**	.450**	.400*	.756**
	Sig. (2-tailed)	.023		.009	.008	.001	.028	.000	.002	.007	.017	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P3	Pearson Correlation	.522**	.436**	1	.628**	.529**	.629**	.421*	.317	.558**	.232	.779**
	Sig. (2-tailed)	.001	.009		.000	.001	.000	.012	.064	.000	.181	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P4	Pearson Correlation	.268	.443**	.628**	1	.471**	.257	.516**	.221	.269	.165	.624**
	Sig. (2-tailed)	.119	.008	.000		.004	.137	.002	.202	.118	.344	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P5	Pearson Correlation	.500**	.545**	.529**	.471**	1	.264	.173	.226	.352*	-.013	.594**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.001	.004		.125	.320	.192	.038	.942	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P6	Pearson Correlation	.430**	.373*	.629**	.257	.264	1	.495**	.582**	.599**	.353*	.739**
	Sig. (2-tailed)	.010	.028	.000	.137	.125		.003	.000	.000	.037	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P7	Pearson Correlation	.387*	.560**	.421*	.516**	.173	.495**	1	.608**	.558**	.366*	.758**
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.012	.002	.320	.003		.000	.000	.030	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P8	Pearson Correlation	.158	.502**	.317	.221	.226	.582**	.608**	1	.617**	.353*	.679**
	Sig. (2-tailed)	.364	.002	.064	.202	.192	.000	.000		.000	.038	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P9	Pearson Correlation	.405*	.450**	.558**	.269	.352*	.599**	.558**	.617**	1	.308	.761**
	Sig. (2-tailed)	.016	.007	.000	.118	.038	.000	.000	.000		.072	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P10	Pearson Correlation	-.113	.400*	.232	.165	-.013	.353*	.366*	.353*	.308	1	.463**
	Sig. (2-tailed)	.517	.017	.181	.344	.942	.037	.030	.038	.072		.005
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.584**	.756**	.779**	.624**	.594**	.739**	.758**	.679**	.761**	.463**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**HASIL UJI REABILITAS VARIABEL KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN (X)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.948	15

**HASIL UJI REABILITAS VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (Y)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.864	10

HASIL UJI HIPOTESIS t

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.461	.444	4.135

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.610	3.002		2.868	.007
	Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679	5.310	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

HASIL UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas Laporan Keuangan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.610	3.002		2.868	.007
	Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679	5.310	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

HASIL KOEFISIEN DETERMINAN

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas Laporan Keuangan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.461	.444	4.135

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/ 2015 (B)

bsite : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpig@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

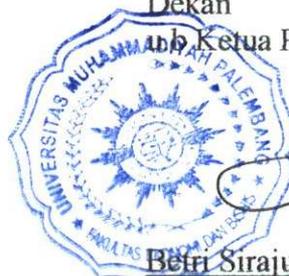
Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Februari 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Nurhasanah Tussakdiyah
Nim : 222013337
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN OGAN ILIR (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E, M.Si., Ak, CA	Pembimbing	6/3 .2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	6/3-2017	
3	Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	6/3 - 2017	
4	Mizan, S.E, M.Si., Ak, CA	Penguji II	6/3 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Nurhasanah Tussakdiyah	PEMBIMBING :
NIM : 22 2013 337	KETUA : Mizan, SE., M.Si, Ak, CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN OGAN ILIR (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	16/12 2016	Up			Teor. Hg
2.					Akuntansi
3.					laporan pemerintah
4.					
5.	17/12 2016	Up			perbaikan lagi
6.					sesuai standar
7.					
8.	22/12 2016	Up			perbaikan data
9.					dan lain sebagainya
10.					
11.	24/12 2016	Up			baik / sesuai
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n Dekan

Program Studi:

Beti Sirajuddin, SE., M.Si, Ak, CA





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Nurhasanah Tussakdiyah	PEMBIMBING :	
NIM :	22 2013 337	KETUA :	Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	7/2 2017	Pomb I s/d IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki pembahas
2.					
3.					
4.	8/2 2017	Pomb I s/d V	<i>[Signature]</i>		perbaiki lagi sesuai arahan.
5.					
6.					
7.	9/2 2017	Pomb V s/ Abstrak	<i>[Signature]</i>		perbaiki sesuai arahan!
8.					
9.					
10.	10/2 2017	Skripsi	<i>[Signature]</i>		Revisi 1/2 ulangan
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditentukan di : Palembang

Pada Tanggal : / /

[Signature]
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Komp. Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kode Pos 30662
INDRALAYA

Indralaya, 8 Februari 2017

Nomor : 900/ 63 /BPKAD/2017
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan selesai riset

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang
di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hasnandar Setiawan, S.E, M.M
NIP : 196209111989031006
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

menerangkan bahwa :

Nama : Nurhasanah tussakdiyah
NIM : 222013297
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang

Sudah selesai melaksanakan penelitian di bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Demikian keterangan dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir,**



H. Hasnandar Setiawan, S.E, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19620911 198903 1 006

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami



Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NURHASANAH TUSSAKDIYAH
NIM : 222013337
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (25)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016, الأربعاء, 21 سبتمبر,
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126902





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Nurhasanah Tussakdiyah
Place/Date of Birth : Palembang, May 04th 1996
Test Times Taken : +1
Test Date : December, 10th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 54
Structure Grammar : 36
Reading Comprehension : 42
OVERALL SCORE : 440

Palembang, December, 20th 2016
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 993/TEA FE/LB/UMP/XII/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

P I A G A M

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : NURHASANAH TUSSAKDIYAH
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013337
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 04-05-1996

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : KEMASRINDO (B)
Kecamatan : KERTAPATI
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301

BIODATA PENULIS

Nama : Nurhasanah Tussakdiyah
Nama Panggilan : OOP
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Mei 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl. A.Yani Lr. Amilin No. 972 RT/RW 16/02
Kelurahan Tangga takat Kecamatan Seberang Ulu
II Palembang
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi Badan, Berat badan : 165 cm, 68 kg
Kewarganegaraan : INDONESIA
Email : nurhasanahtussakdiyah@gmail.com
No Hp : 0821 6533 5580
Nama Ayah : Drs. Hasan Effendy
Nama Ibu : Dra. Cholidja Tussakdiyah

Riwayat Pendidikan :

1. 2001-2007 SD Negeri 101 Palembang
2. 2007-2010 SMP Negeri 16 Palembang
3. 2010-2013 SMA Negeri 8 Palembang
4. 2013-2017 Universitas Muhammadiyah Palembang